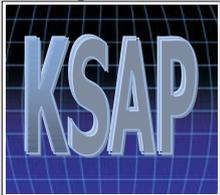


# Laporan Tahunan 2005



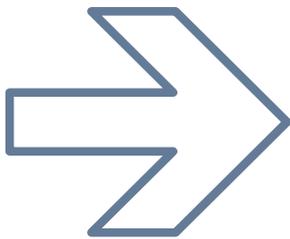
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN





Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyampaikan PP No.24/2005 kepada Ketua BPK-RI, Anwar Nasution pada Launching PP No.24/2005, Istana Wakil Presiden RI, 6 Juli 2005

# Daftar Isi



## Daftar Isi

Sambutan Ketua Komite Konsultatif SAP

Pengantar Ketua Komite Kerja SAP

Bab I Pendahuluan

Bab II Rencana Kerja KSAP

Bab III Kinerja KSAP

Bab IV Rencana Kerja tahun 2006

Bab V Penutup

Lampiran lampiran

## Sambutan Ketua Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengemban tugas yang berat dalam menyusun standar akuntansi pemerintahan yang harus diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar tersebut disusun dengan memperhatikan aspek mudah dipahami bagi para pengguna sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

Pada tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual telah ditetapkan oleh Presiden RI dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Laporan Tahunan 2005 ini memuat kegiatan KSAP selama tahun 2005, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dapat dilakukan oleh KSAP.

Komite Konsultatif menghargai upaya KSAP menyusun Laporan Tahunan 2005 agar dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada para *Stakeholders*, khususnya Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan.

Dalam Strategi jangka panjang, KSAP berencana menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Sampai saat ini komite sudah melakukan kajian-kajian dan penyusunan standar tersebut secara bertahap.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Komite Konsultatif atas saran-saran yang telah diberikan kepada KSAP dalam melaksanakan tugasnya selama ini, dan kepada para anggota Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun dan mengembangkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Demikian juga kepada Kelompok Kerja dan Sekretariat KSAP, serta pihak-pihak lain yang mendukung keberhasilan penyusunan SAP.

Semoga Laporan Tahunan 2005 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kinerja KSAP.

Jakarta, 2006  
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Mulia P. Nasution

## Pengantar Ketua Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan



KSAP menyusun Laporan Tahunan 2005 sebagai suatu media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kinerja KSAP kepada Menteri Keuangan dan untuk pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Laporan ini memuat kegiatan KSAP selama tahun 2005

Beberapa kegiatan penting telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2005, yaitu penyusunan dan penyelesaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yang terdiri dari Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peluncuran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

KSAP juga melakukan kegiatan untuk mendorong implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan melalui sosialisasi dan penyusunan Buletin Teknis Nomor 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat dan Buletin Teknis Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah. Selain itu KSAP juga telah melakukan penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara bertahap sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite Konsultatif SAP atas saran yang sangat berharga dalam penyusunan standar ini. Demikian pula kepada para anggota Komite Kerja, Kelompok Kerja dan Sekretariat KSAP yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk KSAP.

Tidak sedikit masukan yang kami terima dari Tim Penelaah SAP Badan Pemeriksa Keuangan, para akademisi dan praktisi dalam penyusunan SAP sehingga sangat membantu dalam proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan.

Kami merasa Laporan Tahunan 2005 belum sempurna, sehingga saran-saran sangat kami harapkan agar penyusunan laporan tahunan berikutnya dapat lebih baik.

Jakarta, 2006  
Ketua Komite Kerja

Binsar H. Simanjuntak



## BAB I PENDAHULUAN

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla bersalaman dengan Komite Konsultatif pada Launching PP No.24/2005, Istana Wakil Presiden RI, 6 Juli 2005

**KSAP adalah Komite yang bersifat independen, dibentuk dengan Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005**

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD yang berupa laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 57 yang menyatakan bahwa KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden. Untuk memenuhi ketentuan tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kegiatan KSAP dibiayai dengan dana APBN yang dialokasikan melalui bagian anggaran Departemen Keuangan. Selama masa tugas tersebut, KSAP telah berhasil menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang pada tanggal 13 Juni 2005 ditetapkan oleh Presiden RI menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP.

### A. Organisasi dan Kedudukan KSAP

KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005. Keppres tersebut menegaskan bahwa KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan

**Susunan  
KSAP terdiri  
dari 9 orang  
Komite  
Konsultatif  
dan 9 orang  
Komite  
Kerja**

dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan.

Sebelum keluarnya Keppres tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang fiskal, Menteri Keuangan RI telah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP) dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.012/2002 tanggal 13 Juni 2002, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KMK.012/2004 tanggal 6 Agustus 2004.

KSAP adalah organisasi yang bersifat independen. Independensi di sini meliputi keanggotaan dan mekanisme dalam pelaksanaan pekerjaan (*due process*). KSAP beranggota kalangan profesional yang berasal dari lingkungan pemerintah, praktisi akuntansi, asosiasi profesi akuntan, dan akademisi yang kompeten di bidang akuntansi sektor publik. Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak terkait lainnya.

Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 mengubah komposisi keanggotaan Komite Konsultatif dan Komite Kerja KSAP. Komposisi Komite Konsultatif, ditambah 2 (dua) anggota sehingga menjadi 9 (sembilan) anggota. Selain itu, ada pergantian pada kedudukan wakil ketua Komite Konsultatif, yaitu semula adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, diganti oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri.

Sementara itu pada Komite Kerja terdapat pergantian anggota, sedangkan jumlah anggota Komite Kerja tetap sebanyak 9 (sembilan) anggota.

Secara lengkap susunan Komite Konsultatif dan Komite Kerja KSAP sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

**Komite Konsultatif:**

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri sebagai Anggota;
4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara sebagai Anggota;
5. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Anggota;
6. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia sebagai Anggota;
7. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia sebagai Anggota;
8. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia sebagai Anggota;
9. Ketua Dewan Penasihat Magister Akuntansi Universitas Indonesia sebagai Anggota.

**Komite Kerja:**

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Dr. Ilya Avianti, SE, M.Si., Ak sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Sonny Loho, Ak., MPM sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
4. Drs. Sugijanto, Ak., MM sebagai Anggota;
5. Dr. Soepomo Prodjoharjono, Ak., M.Soc.Sc sebagai Anggota;
6. Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM sebagai Anggota;
7. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM sebagai Anggota;
8. Drs. AB Triharta, Ak., MM sebagai Anggota;
9. Gatot Supiartono, Ak., M.Acc sebagai Anggota;

**B. Tugas Pokok KSAP**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005, KSAP bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah (RPP SAP). SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep RPP SAP. Penyusunan konsep SAP ini secara operasional dilaksanakan oleh Komite Kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Kerja senantiasa berkonsultasi dan dapat meminta pendapat dari Komite Konsultatif.

Sesuai prosedur wajib yang tercantum dalam Kepres Nomor 84 tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005, dalam mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, Komite Kerja melakukan proses penyiapan standar (*due process*) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (*best international practices*). Untuk membantu pelaksanaan tugas ini, KSAP membentuk Kelompok Kerja KSAP. Kelompok Kerja bertugas membantu Komite Kerja dalam perumusan dan pengembangan SAP.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Kerja membentuk Kelompok Kerja yang tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja. Kelompok Kerja terakhir kali dibentuk tanggal 2 Maret 2005 dengan nomor kep.49/KSAP/III/2005 dan diubah pada tanggal 5 Oktober 2005 dengan KEP-300/KSAP/X/2005. Kelompok Kerja KSAP beranggotakan 25 orang yang berasal dari berbagai lembaga. Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut:

**Kelompok Kerja**

1. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Ketua;
2. Firmansyah Nazaroeddin, Ak., Msc, Wakil Ketua;

3. Margustienny OA, Ak., MBA, Anggota;
4. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota;
5. Amdi Very Dharma, Ak., MAcc, Anggota;
6. Bambang Pamungkas, SE, Ak., MBA, Anggota;
7. Dr. Haryono Umar, Ak., MSc., Anggota;
8. Drs. I Made Suryawan, Anggota;
9. Pasni Rusli, Anggota;
10. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota;
11. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota;
12. Wiwin Istanti, SE, Ak., Anggota;
13. Chalimah Pujihastuti, SE, Ak., MAFIS, Anggota;
14. Edward UP Nainggolan, Ak., Anggota;
15. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota;
16. Yulia Chandra Kusumarini, SE, S.Sos, Anggota;
17. Mulat Handayani, SE, Ak., Anggota;
18. Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota;
19. Farida Aryani, Ak., Anggota;
20. Eli Tamba, SE, Ak., Anggota;
21. Joko Supriyanto, SST, Ak., Anggota;
22. Dita Yuvrita, SE, Ak., Anggota;
23. Syaiful, SE, Ak., Anggota
24. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
25. M. Rizal Faisol, SST, Ak., Anggota

Selain itu, KSAP juga dibantu oleh Sekretariat KSAP, yang susunan organisasi serta tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 547/KMK.06/2004 tentang Sekretariat KSAP, susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut:

#### **Sekretariat:**

1. Margustienny OA, Ak., MBA, Ketua;
2. Mulat Handayani, SE, Ak., Wakil Ketua;
3. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota;
4. Edward UP Nainggolan, Ak., Anggota;
5. Yulia Chandra Kusumarini SE, S. Sos., Anggota;
6. Joko Supriyanto, SST, Ak., Anggota;
7. Sumarno, SE, Ak., Anggota;

Sekretariat KSAP yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor 547/KMK.06/2004 bertugas:

1. Memberikan dukungan administratif kepada KSAP dalam rangka penyusunan dan sosialisasi SAP;
2. Mengelola website KSAP;
3. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.



Rapat Pleno Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Januari 2005



## BAB II

# RENCANA KERJA KSAP

Tata kelola yang baik (*good governance*) menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dimaksud, Pemerintah wajib menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara yang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan kepada legislatif adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK-RI. Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan. Informasi keuangan harus disajikan secara obyektif dan dapat diyakini keandalannya. Oleh karena itu diperlukan adanya standar akuntansi yang berisi prinsip-prinsip akuntansi yang harus dipatuhi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam Pasal 32 UU No. 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa SAP disusun oleh KSAP.

Dalam rangka mengemban amanat tersebut, KSAP menyusun rencana kerja jangka menengah, yang berupa rencana kerja lima tahun dan rencana kerja tahunan.

Rencana kerja ini disusun sesuai dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Berbagai hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diuraikan di atas merupakan lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan KSAP dalam mencapai kinerjanya.

### A. Lingkungan Strategis

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Pusat/Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan pertanggungjawaban APBN/APBD yang telah diperiksa oleh BPK kepada

DPR/DPRD selambat-lambatnya mulai tahun anggaran 2006. Dengan demikian Pemerintah perlu segera membangun sistem akuntansi yang mengacu kepada SAP. Kebutuhan ini tidak dapat ditunda lagi karena hanya ada waktu satu tahun untuk mengembangkan dan mengimplementasikan SAP supaya dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meminimalkan asimetri informasi antara pemerintah dan pengguna laporan keuangan, BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah. Kriteria pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan adalah SAP. Dengan telah diterbitkannya PP tentang SAP, maka Pemerintah Pusat/Daerah sudah wajib menerapkan SAP dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pertanggungjawaban APBN/APBD.

Dengan mencermati perkembangan lingkungan strategis tersebut, KSAP memiliki komitmen untuk selalu bekerja secara terarah dan terencana, dan dituangkan dalam suatu Rencana Strategis KSAP. Visi, Misi, Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis pada dasarnya mengarah pada pemberlakuan SAP yang dapat diterima oleh seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara/daerah yang akuntabel dan transparan.

# Misi

**.....Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.....**

## B. Rencana Strategis

Rencana strategis suatu organisasi memuat visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai. KSAP telah merumuskan rencana strategis dengan visi, misi dan tujuan berikut ini.

### Visi :

*"Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas"*

### Misi :

1. Mewujudkan standar akuntansi pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan .

Dari visi dan misi di atas, KSAP menetapkan **tujuan-tujuan** berikut ini.

1. Menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai SAP.
3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KSAP telah menyusun rencana kerja jangka menengah

A. Tahun 2004		
	Penerbitan PP SAP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Draf PP SAP</li> <li>2. Pembahasan dengan Setneg untuk Penerbitan PP SAP</li> </ol>
	Penyusunan buletin teknis dan interpretasi SAP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan buletin teknis SAP                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neraca Awal</li> <li>- Bagan Perkiraan Standar</li> </ul> </li> <li>2. Penyusunan interpretasi SAP ( 5 ISAP )</li> </ol>
	Sosialisasi PP SAP	Pelaksanaan Sosialisasi PP SAP dilima kota
	Draf Publikasian (DP) SAP berbasis akrual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan standar akuntansi berbasis akrual (KK + 7 PSAP) Sesuai due process KSAP kecuali public hearing dan permintaan BPK</li> <li>2. Pelaksanaan Limited Hearing DP SAP Akrual</li> <li>3. Finalisasi Draf SAP akrual</li> </ol>
	SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional</li> <li>- Seminar/kongres/konferensi internasional</li> </ul>

## B. Tahun 2005

	<p>Peningkatan Kompetensi SDM dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi SAP di 7 kota</li> <li>2. Pengembangan SDM KSAP                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional</li> <li>- Seminar/kongres/konferensi internasional</li> </ul> </li> </ol>
	<p>Penyusunan SAP dan Derivasinya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finalisasi RPP tentang SAP</li> <li>2. Penyusunan buletin teknis dan interpretasi SAP</li> <li>3. Penyusunan Draf SAP berbasis akrual                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan 11 Draf SAP berbasis akrual</li> <li>- Pelaksanaan Limited Hearing</li> <li>- Pelaksanaan Public Hearing</li> <li>- Finalisasi Draf SAP</li> </ul> </li> </ol>

## C. Tahun 2006

	<p>Draf Publikasian (DP) SAP berbasis akrual</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan 8 DP standar akuntansi berbasis akrual</li> <li>2. Pelaksanaan Limited Hearing DP SAP akrual</li> <li>3. Pelaksanaan Public Hearings</li> </ol>
	<p>Sosialisasi/Bantuan Implementasi SAP</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Lokakarya (Workshop)</li> <li>2. Penyelenggaraan Helpdesk</li> <li>3. Pelaksanaan Training of Trainers</li> </ol>
	<p>SDM KSAP yang andal</p>	<p>Pengembangan SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional</li> <li>- Seminar/kongres/konferensi nasional dan internasional</li> </ul>

## D. Tahun 2007

	<p>Draf PSAP berbasis Akrual</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan 5 DP standar akuntansi berbasis akrual</li> <li>2. Pelaksanaan Public Hearings</li> <li>3. Penyempurnaan DP Kerangka Konseptual dan PSAP 01 s/d 20 berbasis akrual</li> </ol>
	<p>Penerbitan PP Standar Akuntansi berbasis Akrual</p>	

Sosialisasi/Bantuan Implementasi SAP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Lokakarya</li> <li>2. Penyelenggaraan Helpdesk</li> <li>3. Pelaksanaan Training of Trainers</li> </ol>
SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional</li> <li>- Seminar/kongres/konferensi nasional dan internasional</li> </ul>

Pada tahun 2005 terjadi perubahan program kerja karena terlambatnya penetapan Peraturan Pemerintah tentang SAP yaitu pada bulan Juni 2005 yang ditargetkan pada bulan Juli 2004. Berdasarkan rencana kerja jangka menengah, program kerja dan kegiatan KSAP tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Derivasinya
  - a. Kegiatan Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
 

Indikator kinerja program ini adalah diselesaikannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sasaran kinerja kegiatan ini adalah ditetapkannya RPP SAP yang berisi Kerangka Konseptual dan sebelas PSAP dalam suatu Peraturan Pemerintah.
  - b. Kegiatan penyusunan buletin teknis dan interpretasi SAP
 

KSAP akan menerbitkan Interpretasi SAP (IPSAP) yang dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari kesalahan tafsir para pengguna SAP. KSAP juga akan menerbitkan buletin teknis untuk memberikan arahan/pedoman penerapan PSAP maupun IPSAP. Indikator kinerja kegiatan ini adalah terbitnya 5 (lima) IPSAP dan 2 (dua) buletin teknis.
  - c. Kegiatan penyusunan draf SAP berbasis akrual
 

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan penerapan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual mulai tahun 2008. Untuk itu KSAP telah mulai menyusun draf SAP berbasis akrual mulai tahun 2004. Indikator kegiatan ini berupa terselesaikannya draf kerangka konseptual draf PSAP berbasis akrual. Pada tahun ini sasaran kinerja KSAP adalah 1 (satu) kerangka konseptual dan 11 (tujuh) draf SAP berbasis akrual.

2. Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan

a. Kegiatan sosialisasi PP tentang SAP

Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan kepada para pengguna. Indikator kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan sasaran para penyusun laporan keuangan pemerintah, legislatif, aparat pengawas fungsional, akademisi dan organisasi profesi terkait di 5 (lima) kota.

b. Kegiatan pengembangan kemampuan SDM KSAP

Untuk meningkatkan kemampuan para anggota KSAP, KSAP mengirimkan para anggotanya mengikuti berbagai seminar, kongres, konferensi bidang akuntansi baik di dalam maupun luar negeri. Disamping itu, KSAP juga melakukan berbagai riset dan pengkajian standar dan praktik akuntansi di berbagai negara. Indikator kinerja yang berkaitan dengan ini adalah keikutsertaan anggota KSAP dalam berbagai seminar/kongres/konferensi bidang akuntansi baik dalam maupun luar negeri dengan sasaran 34 orang.

## BAB III KINERJA KSAP



### A. Capaian Kinerja

Sejak awal pembentukannya, KSAP telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mengarah pada penyusunan standar akuntansi pemerintahan. Selama periode tahun 2002 sampai tahun 2004 KSAP telah melakukan kegiatan penyusunan Kerangka Konseptual dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (No.1 s.d. 11) beserta Draf RPP tentang SAP. Kegiatan penyusunan dan penyempurnaan SAP beserta derivasinya masih terus dilaksanakan oleh KSAP pada tahun 2005 dan pada tahun-tahun berikutnya. Capaian kinerja KSAP pada tahun 2005 adalah:

Penyelesaian Draft RPP SAP dan Penetapan RPP tentang SAP oleh Presiden RI yaitu PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  
Peluncuran PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP oleh Wakil Presiden RI di Istana Wakil Presiden pada tanggal 6 Juli 2005

Sosialisasi PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP di beberapa daerah

Penetapan 2 Buletin Teknis yaitu Buletin Teknis No. 1 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat dan Buletin Teknis No. 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah.

Penyusunan draf SAP berbasis akrual (KK dan 11 Pernyataan)

Pengembangan SDM dengan mengirim SDM KSAP untuk mengikuti berbagai seminar, kongres dan konferensi akuntansi baik di luar maupun dalam negeri

## B. Pelaksanaan Kegiatan

### 1. Program Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Derivasinya

#### ***Kegiatan 1: Finalisasi dan Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan***

Sampai dengan akhir tahun 2004, KSAP telah menyusun dan mengembangkan standar akuntansi pemerintahan. Pada tahun tersebut menghasilkan 12 draf publikasian SAP. Keduabelas draf publikasian SAP tersebut telah dibahas dalam dengar pendapat terbatas (*limited hearing*) dan dengar pendapat publik (*public hearing*) di beberapa kota. Draf publikasian tersebut juga telah disampaikan kepada BPK-RI untuk permintaan pertimbangan.

Pada tanggal 17 Januari 2005, BPK menyampaikan Pertimbangan atas draf Standar Akuntansi Pemerintahan dengan surat nomor: 01/S//01/2005 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mengesahkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan BPK-RI atas draf standar akuntansi pemerintahan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kepada Menteri Keuangan. Kemudian Menteri Keuangan mengirim surat Permintaan Pertimbangan Hukum atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai tindak lanjutnya dilaksanakan Pembahasan RPP tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diikuti dari beberapa departemen/lembaga dan pemerintah daerah. Dari pembahasan tersebut disepakati beberapa perubahan RPP SAP dan Menteri Keuangan dapat segera menyampaikan RPP SAP tersebut kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi peraturan Pemerintah.

Pada tanggal 9 Mei 2005, Menteri Keuangan melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan RPP SAP kepada Presiden. Dan pada puncaknya, pada tanggal 13 Juni 2005, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP.

#### ***Kegiatan 2: Penyusunan Buletin Teknis dan Interpretasi SAP***

Untuk melengkapi SAP, KSAP telah menyusun draf Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah. Tujuan penyusunan Buletin Teknis ini untuk membantu entitas pelaporan dalam menyusun neraca awal yang sesuai dengan SAP dan mengatasi

masalah yang mungkin timbul dalam penyusunan neraca awal. Dalam rangka memperoleh masukan dan penyempurnaan buletin teknis tersebut, KSAP melakukan lokakarya dengan tema "Neraca Awal Pemerintah : Kendala, Tantangan dan Solusi." Lokakarya diadakan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2004. Setelah diadakan lokakarya tersebut KSAP menyempurnakan kembali draf Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal berdasarkan masukan peserta lokakarya.

Pada Bulan Desember 2004 KSAP menyampaikan Materi Buletin Teknis Neraca Awal Pemerintah tersebut pada acara Konvensi Nasional Akuntansi di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh IAI.

Kemudian, pada tanggal 27 September 2005 KSAP menetapkan 2 buletin teknis, yaitu:

1. Buletin Teknis SAP Nomor 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat; dan
2. Buletin Teknis SAP Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah.

### ***Kegiatan 3: Penyusunan draf SAP berbasis akrual***

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa pengukuran pendapatan dan belanja dengan basis akrual selambat-lambatnya tahun 2008. Oleh karena itu sesuai dengan rencana lima tahunan, KSAP akan mengembangkan dan menyusun Standar Akuntansi Berbasis Akrual. Pada tahun 2004 KSAP telah mulai melaksanakan kegiatan

penyusunan standar tersebut, berupa Kerangka Konseptual dan 6 (enam) pernyataan standar berbasis akrual, dan pada tahun 2005 ini KSAP telah melakukan pembahasan draf Kerangka Konseptual, Penyajian Laporan Keuangan, dan Laporan Realisasi Anggaran, serta melakukan penyusunan 5 (lima) standar berbasis akrual. Penyusunan standar mengacu pada *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* dan sumber lainnya. Strategi pengembangannya dilakukan dengan adaptasi, yaitu disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Kemudian PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP (berbasis kas menuju akrual) diteliti ulang dan disesuaikan dengan basis akuntansi akrual. Struktur penyajian PSAP sedapat mungkin dipertahankan untuk memudahkan para pengguna mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada SAP berbasis kas menuju akrual menjadi SAP berbasis akrual. Draft standar yang disusun meliputi:

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan;
2. Penyajian Laporan Keuangan;
3. Laporan Realisasi Anggaran;
4. Laporan Arus Kas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan;

6. Akuntansi Persediaan;
7. Akuntansi Investasi;
8. Akuntansi Aset Tetap;
9. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
10. Akuntansi Kewajiban;
11. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; dan
12. Laporan Keuangan Konsolidasian.

## 2. Program Pembangunan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang Akuntansi Pemerintahan

### *Kegiatan 4: Peluncuran dan Sosialisasi PP tentang SAP*

Setelah SAP ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005, kegiatan yang pertama kali diadakan adalah peluncuran PP tentang SAP. Peluncuran PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP tersebut dilakukan oleh Wakil Presiden RI di Istana Wakil Presiden pada tanggal 6 Juli 2005. Peluncuran tersebut dihadiri oleh kurang lebih 200 peserta yang terdiri dari Ketua dan Anggota BPK-RI, Ketua Komisi XI DPR-RI, Ketua Panitia Anggaran DPR-RI, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pejabat Eselon I Departemen Keuangan, Gubernur, Bupati, Walikota, Pimpinan DPRD, Rektor Perguruan Tinggi, Perwakilan Lembaga Internasional (IMF, ADB, dan World Bank), Anggota KSAP, dan undangan lainnya.

Selanjutnya, KSAP mengadakan kegiatan sosialisasi PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP kepada para pengguna (*users*) SAP di beberapa daerah, yaitu:

1. Jakarta, diselenggarakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 26 dan 27 Juli 2005.
2. Makassar, tanggal 24 Agustus 2005.
3. Surabaya, tanggal 25 Agustus 2005.
4. Denpasar, tanggal 30 Agustus 2005.
5. Medan, tanggal 1 September 2005.

Selain sosialisasi yang diadakan di 5 kota tersebut di atas, KSAP juga mengadakan sosialisasi PP Nomor 24 Tahun 2005 untuk Kantor Wilayah Perbendaharaan di beberapa kota yaitu Palangkaraya, Gorontalo, Ternate, Denpasar, Jambi, Bengkulu, Pontianak, Kupang. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai SAP bagi para pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang melaksanakan

fungsi dan tugas dalam pemrosesan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat di tingkat wilayah.

#### **Kegiatan 5: Pengembangan Kemampuan SDM KSAP**

Di bidang pengembangan SDM, KSAP mengirim beberapa anggotanya mengikuti seminar, kongres, dan konferensi baik di dalam negeri maupun luar negeri, yaitu:

1. Seminar Nasional Pengelolaan Keuangan Negara, yang diadakan di Jakarta tanggal 3 s.d 4 Februari 2005. KSAP mengirimkan: Mulat Handayani, SE, Ak., Farida Ariyani, SE, Ak., Joko Supriyanto, SST, Ak., dan Sumarno, SE, Ak.
2. *Workshop on Implementation Aspects of Accrual Accounting and Classification Systems*, di New Delhi, India, pada tanggal 13 s.d 18 September 2005. KSAP diwakili oleh: Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA (Ketua Komite kerja KSAP) dan Drs. Mhd. Syahman Sitompul (dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan). Salah satu hasil dari workshop ini adalah disarankan agar Indonesia dapat menjadi anggota *Association of Government Accounts Organizations of Asia (AGAOA)*.
3. *International Financial Reporting Standard (IFRS) Regional Policy Forum*, di Sydney, Australia pada tanggal 23 s.d 24 Oktober 2005. KSAP diwakili oleh Ahmadi Hadibroto, (anggota Komite Konsultatif) dan Drs. Jan Hoesada, Ak., MM. (anggota Komite Kerja)
4. *Seventeenth Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues*, di Wellington, New Zealand, pada tanggal 20 s.d 23 November 2005. KSAP diwakili oleh Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM. (Anggota Komite Kerja)
5. *Meeting of OECD-Asian Senior Budget Officials Network*, di Bangkok, Thailand, pada tanggal 15 s.s 16 Desember 2005. KSAP diwakili oleh Dr. Mulia P. Nasution (Ketua Komite Konsultatif) dan Sonny Loho, Ak., MPM. (Sekretaris Komite Kerja)

Dalam rangka memberi informasi mengenai organisasi KSAP dan produk standar akuntansi yang dihasilkan, KSAP juga telah membangun Website KSAP dengan alamat : <http://www.ksap.org>. Yang dikelola oleh Sekretariat KSAP sejak Juli 2004. Pengembangan Website ditujukan pada ekspose PSAP dan Draf PSAP dan berbagai informasi penting lainnya yang diperlukan para pengunjung website. Pada website tersebut juga tersedia email untuk para anggota KSAP.

### **C. Aspek Keuangan**

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2005, KSAP mendapatkan alokasi dana sebesar Rp3,66 Milyar dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan. Untuk mencapai target kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2005, KSAP telah merealisasikan sebesar Rp2,7 Milyar atau sekitar 74 % dari

anggaran yang dialokasikan. Beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2005 adalah penyelenggaraan *limited hearing* dan *help desk* KSAP. Selain itu, realisasi frekuensi pembahasan SAP berbasis akrual juga hanya 70 % dari yang direncanakan.

Rincian realisasi pengeluaran per jenis belanja dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Kode Belanja	Jenis Belanja	Jumlah (Dalam Rupiah)	
		Anggaran	Realisasi
521114	Belanja Barang untuk Pelaksanaan Tupoksi (Bersifat Kontraktual)		
	- Sosialisasi SAP	99.600.000	84.300.000
	- Penyusunan SAP	491.420.000	490.428.750
	- Pemeliharaan Situs KSAP	20.100.000	0
	- Helpdesk KSAP	20.100.000	0
	<b>Subtotal .....</b>	<b>631,220,000</b>	<b>574,728,750</b>
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		
	- Penyusunan SAP	2.341.452.000	1.644.741.783
	- Pemeliharaan Situs KSAP	28.320.000	2.200.000
	- Helpdesk KSAP	34.600.000	0
	<b>Subtotal .....</b>	<b>2,404,372,000</b>	<b>1,646,941,783</b>
524111	Belanja Perjalanan Biasa		
	- Penyusunan SAP	603.000.000	465.313.000
	- Pemeliharaan Situs KSAP	16.630.000	9.376.000
	- Helpdesk KSAP	4.000.000	0
	<b>Subtotal .....</b>	<b>623,630,000</b>	<b>474,689,000</b>
	<b>Total .....</b>	<b>3,659,222,000</b>	<b>2,696,359,533</b>

Dalam rangka independensi KSAP di bidang keuangan, pada tahun anggaran 2006 direncanakan KSAP memperoleh aloksi dana tersendiri berupa satuan kerja sementara yang tidak merupakan bagian anggaran dari salah satu kementerian.

#### D. Kendala dan Strategi Pemecahannya

Pada tahun 2005 ini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KSAP, antara lain adalah:

- Sebagai dampak dari terlambatnya penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2005, beberapa rencana kerja/kegiatan yang telah disusun KSAP juga mengalami penundaan, sehingga beberapa kegiatan seperti rapat penyusunan SAP berbasis akrual frekuensinya hanya 70% dari yang direncanakan.
- Sejak awal pembentukannya, sebagian besar anggota KSAP (Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat) berasal dari pegawai di lingkungan pemerintahan yang mempunyai tugas pokok masing-masing. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan terutama help desk KSAP belum dilaksanakan secara efektif.
- Karena keterbatasan waktu dan kesibukan pada akhir tahun 2005, kegiatan *limited hearing* yang direncanakan diselenggarakan pada bulan Desember 2005, tidak dapat direalisasikan.

Untuk memecahkan kendala tersebut di atas, KSAP melakukan beberapa upaya, yaitu:

- Mengefektifkan setiap agenda kegiatan rapat dan penyelesaian pekerjaan.
- Meneliti kembali skala prioritas pekerjaan yang harus segera diselesaikan.
- Mengefektifkan tim website KSAP dalam penyelenggaraan help desk KSAP.

## BAB IV

# RENCANA KERJA TAHUN 2006



Untuk mendukung implementasi SAP tahun 2006 dan pengembangan SAP berbasis akrual, pada tahun 2006 KSAP merencanakan melakukan kegiatan sebagai berikut:

### 1. Penyusunan SAP Berbasis Akrual

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk menerapkan standar akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2008. Untuk mendukung terlaksananya amanat tersebut, KSAP akan melakukan pembahasan draf Kerangka Konseptual dan sebelas draf PSAP berbasis akrual pada tahun 2006.

### 2. Penyelenggaraan *Limited Hearing* DPSAP Berbasis Akrual

Sesuai dengan *due process* penyusunan SAP, KSAP akan melaksanakan 1 (satu) kali *limited hearing* atas draf SAP berbasis akrual. Tujuan *limited hearing* adalah untuk mendapatkan masukan atas draf SAP yang disusun. Peserta *limited hearing* diharapkan berasal dari para akademisi dan praktisi akuntansi pemerintahan.

### 3. Penyusunan Buletin Teknis dan Interpretasi PSAP

KSAP akan menyusun 2 buletin teknis dan 2 interpretasi PSAP. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap *issue* tertentu yang ditemui dalam SAP berbasis kas menuju akrual, sehingga para pengguna dapat memahami dan melaksanakan SAP dengan baik.

#### 4. Workshop SAP (*cash toward accrual*) dan Buletin Teknis

SAP harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk tahun anggaran 2005. Untuk itu, KSAP akan mengadakan *workshop* mengenai SAP dan buletin teknis sebanyak 4 kali. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2005.

#### 5. TOT SAP (*cash toward accrual*)

Sumber daya manusia KSAP masih sangat terbatas untuk dapat melayani seluruh pengguna (user) SAP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu KSAP merencanakan untuk mengadakan *Training of Trainers* (TOT) yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi para calon pengajar di luar KSAP yang akan mensosialisasikan SAP.

#### 6. Pemeliharaan Website KSAP

Pada tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya.

#### 7. Penyelenggaraan Help Desk

SAP merupakan hal yang baru bagi para penyusun laporan keuangan pemerintah dan pengguna SAP lainnya. Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkannya, KSAP akan membentuk *help desk* yang akan menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP, kemudian KSAP akan berusaha memberikan pemecahannya.

#### 8. Pengembangan SDM KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP berbasis akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan anggotanya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktek akuntansi baik untuk internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

## **9. Survei/Riset Implementasi SAP**

Survei/Riset Implementasi SAP ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana para pengguna SAP menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangannya, dan masalah-masalah apa saja yang ditemukan selama penerapan SAP tersebut.

## **10. Pelayanan Publik**

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.



Talk Show KSAP, PRJ Kemayoran, 20 Agustus 2005

## BAB V PENUTUP

Laporan Tahunan 2005 ini merupakan laporan pertanggungjawaban KSAP dan diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi KSAP dan pihak-pihak yang berkepentingan. Masukan dari berbagai pihak baik mengenai substansi standar, interpretasi, buletin teknis, bantuan implementasi, dan hal-hal lainnya dapat diberikan kepada KSAP agar di masa mendatang KSAP dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan dan menyusun standar akuntansi pemerintahan serta memberi dukungan teknis implementasi SAP sehingga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

seminar nasional  
**pengelolaan keuangan  
perspektif indonesia**

NAM Centre Kemayoran - Jakarta 3 - 4 Pebruari 2005



Ketua Komite Konsultatif, Mulia P. Nasution dalam seminar nasional  
"Pengelolaan Keuangan Perspektif Indonesia, Februari 2005"

Lampiran  
Lampiran

